

Pengaruh Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Indeks Pembangunan Manusia

Filasti Rahma^{1*}, Yunarsi², Wilda Fatmala³, Dewi Yulianti⁴

¹Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

²Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

³Politeknik Baubau, Baubau, Indonesia

⁴BPKAD, Bombana, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Received: 3 April 2022

Revised: 21 September 2022

Accepted: 20 Oktober 2022

DOI : 10.57151/jeko.v1i2.9

KEYWORD

Efektivitas Pendapatan Asli Daerah; Indeks Pembangunan Manusia; Kemandirian Fiskal; Keserasian Belanja; Pertumbuhan Ekonomi

Effectiveness of Regional Original Revenue; Human Development Index; Fiscal Independency; Expenditure Harmony; Economic Growth

CORRESPONDING AUTHOR

Nama : Filasti Rahma

Address: Jl. Betoambari Lr. Kuda Putih Kota Baubau Sulawesi Tenggara

E-mail : rahmafilasti@gmail.com

No. Tlp : +6285322223555

A B S T R A C T

Pembangunan manusia merupakan sebuah proses pembangunan yang bertujuan agar manusia mampu memiliki lebih banyak pilihan, khususnya dalam pendapatan, kesehatan dan pendidikan dimanasalah satu tolok ukurnya dapat dilihat melalui Indeks Pembangunan Manusia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kinerja keuangan (kemandirian fiskal, efektivitas PAD, keserasian belanja) dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia di Kabupaten Bombana serta variabel yang paling besar pengaruhnya terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (time series). Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa kemandirian fiskal, efektivitas Pendapatan Asli Daerah, keserasian belanja dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan pengaruh yang paling besar terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Human development is a process of human development that aims to be able to have more choices, particularly in income, health and education dimanasalah of the criterion can be seen through the Human Development Index. The aim of research was to analyze and obtain empirical evidence on the influence of financial performance (fiscal independency, effectiveness of Regional Original Revenue, and expenditure harmony) and economic growth on human development index in Bombana Regency and to find out the most dominant variable influencing human development index. The research was descriptive qualitative study to give a systematic, factual and accurate description on the facts and real condition of financial performance, economic growth, and human development index in Bombana Regency. The data in the research were time series secondary data obtained from library study. They were analyzed using multiple linear regression analysis. The result of the research indicate that fiscal independency, the effectiveness of Regional Original Revenue, expenditure harmony, and economic growth have influence on human development index. Economic growth has the most dominant influence on human development index.

PENDAHULUAN

Pembangunan merupakan proses yang berkesinambungan dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Teja, 2015). Paradigma pembangunan yang sedang berkembang saat ini adalah pembangunan yang diukur dengan pembangunan manusia yang dilihat dengan tingkat kualitas hidup manusia di tiap-tiap wilayah. Salah satu tolok ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli) (Hobrouw dkk., 2021). Melalui peningkatan tiga indikator tersebut diharapkan akan terjadi peningkatan kualitas hidup manusia. Hal ini dikarenakan adanya heterogenitas individu, disparitas geografis serta kondisi sosial masyarakat yang beragam sehingga menyebabkan tingkat pendapatan tidak lagi menjadi tolok ukur utama dalam

menghitung tingkat keberhasilan pembangunan. Namun demikian, keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi tercapainya tertib sosial.

Perkembangan IPM Provinsi Sulawesi Tenggara dalam kurun waktu tahun 2004 sampai dengan tahun 2013 semakin membaik, IPM Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2013 mencapai 71,73 masih rendah dibandingkan rata-rata IPM nasional 73,81, dengan ranking IPM Sulawesi Tenggara tahun 2013 menduduki peringkat ke 25 secara nasional dan peringkat ke 5 di pulau Sulawesi setelah Gorontalo. Berdasarkan data IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2004 sampai dengan 2013 mengalami peningkatan yaitu 66,69 pada tahun 2004 menjadi 71,73. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir secara umum hanya dua daerah yang tingkat IPM nya diatas rata-rata IPM Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu Kota Kendari sebesar 77,02 dan Kota Bau-Bau sebesar 75,10. IPM terendah adalah di Kabupaten Bombana sebesar 69,67 dan Kabupaten Muna sebesar 68,97. Bombana merupakan daerah dengan tingkat IPM kedua terendah diantara kabupaten-kabupaten lainnya, terutama terhadap kabupaten yang sama-sama sebagai daerah otonomi baru seperti Konawe Selatan, Konawe Utara, Kolaka Utara dan Wakatobi (BPS, 2013).

Peran pemerintah dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia dipengaruhi oleh desentralisasi fiskal melalui kinerja keuangan pemerintah dalam mengalokasikan anggaran dengan didasarkan pada pertimbangan bahwa daerahlah yang lebih mengetahui kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakatnya, sehingga dengan desentralisasi dan otonomi diharapkan dapat memacu peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Mayangsari, 2017) meneliti tentang dampak desentralisasi fiskal terhadap kesejahteraan masyarakat yang diukur dari pencapaian masyarakat atas kebutuhan dasar (*basic needs*), yaitu pendidikan yang lebih baik dan penduduk yang sehat, bahwa desentralisasi fiskal berpengaruh positif terhadap pencapaian kebutuhan dasar bagi masyarakat. Selain desentralisasi fiskal melalui kinerja keuangan pemerintah, peran pertumbuhan ekonomi juga tidak kalah pentingnya dalam mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia. Pembangunan manusia dapat dilihat sebagai suatu aspek yang dapat mempengaruhi maksimalisasi keuangannya (Agustiawan dkk, 2022). Dengan demikian, pembangunan manusia selalu berhubungan dengan modal manusia, sedangkan modal manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga pembangunan manusia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi (Ranis, 2022).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Swandewi, 2014), menunjukkan bahwa dana perimbangan dan kemandirian keuangan daerah pengaruh positif terhadap keserasian anggaran, namun dana perimbangan tidak signifikan pada tingkat signifikansi 5 persen. Kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan, dan keserasian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran, sedangkan kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui keserasian anggaran. Selain itu, hasil penelitian lain yang dilakukan oleh (Wahyuni dkk., 2014) hasil estimasi ditemukan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi positif secara signifikan oleh desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja. Semakin tinggi derajat desentralisasi fiskal, pertumbuhan ekonomi, dan penyerapan tenaga kerja suatu daerah, maka akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh (Amalia & Purbadharmaja, 2014), hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan bahwa secara simultan kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh signifikan terhadap IPM. Secara parsial kemandirian keuangan daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Hasil empiris penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan daerah tahun lalu berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Tingkat ketergantungan tahun lalu berpengaruh signifikan dengan arah negatif terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya. Sementara itu, efektivitas PAD tahun lalu, tingkat pembiayaan SiLPA tahun lalu dan rasio ruang fiskal tahun lalu, masing-masing berpengaruh signifikan dalam arah positif terhadap alokasi belanja modal tahun berikutnya (Hidayat & Maski, 2013). Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Saputra, 2013) mengindikasikan bahwa, desentralisasi fiskal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio PAD dan DAK terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan terhadap IPM sedangkan variabel DAU berpengaruh negatif signifikan. Sementara itu rasio DBH terhadap belanja modal

menjadi satu-satunya variabel yang tidak signifikan mempengaruhi IPM. Pertumbuhan ekonomi menjadi variabel dengan pengaruh paling dominan terhadap IPM (Siburian et al., 2021).

Dari fenomena gap dan *research gap* yang telah dideskripsikan diatas, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh kinerja keuangan (tingkat kemandirian fiskal, efektifitas PAD, keserasian belanja) dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

METODE

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bombana. Obyek utama dari penelitian ini adalah kinerja keuangan, pertumbuhan ekonomi dan Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bombana Menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif untuk memberikan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat. Pendekatan Kuantitatif yang digunakan dalam penelitian merupakan suatu metode yang didasari oleh falsafah positivisme yaitu ilmu yang valid, ilmu yang dibangun dari empiris, teramati, terukur, menggunakan logika matematika, dan membuat generalisasi atas rerata (Made., 2006). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder runtut waktu (*time series*). Data sekunder dalam bentuk APBD tahun 2004-2013 dan realisasinya, PDRB Kabupaten Bombana, dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bombana tahun 2004-2013. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi adalah studi kepustakaan dan dokumentasi. Metode analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda yang digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh dari perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya yang ada.

HASIL & PEMBAHASAN

Analisis kemandirian fiskal daerah (otonomi fiskal) terhadap APBD bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Tabel 1. Data Rasio Kemandirian Fiskal Kabupaten Bombana Tahun 2004-2013

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi Dana Perimbangan dan Pinjaman	%	Keterangan
2004	2,256,000	67,869,136	3.32	Sangat Kurang
2005	4,322,510	197,653,000	2.19	Sangat Kurang
2006	9,752,335	223,653,060	4.36	Sangat Kurang
2007	4,949,800	264,255,000	1.87	Sangat Kurang
2008	12,327,518	295,738,887	4.17	Sangat Kurang
2009	6,686,231	296,650,887	2.25	Sangat Kurang
2010	11,501,060	303,486,832	3.79	Sangat Kurang
2011	14,713,439	353,515,879	4.16	Sangat Kurang
2012	22,710,060	421,035,814	5.39	Sangat Kurang
2013	20,759,161	454,241,330	4.57	Sangat Kurang

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan tabel 1 diatas, perhitungan kemandirian fiskal menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah daerah Kabupaten Bombana dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2004-2013 masih sangat rendah dengan rata-rata 3,6% kurang dari 10% dengan kata lain pola hubungan keuangan Kabupaten Bombana dengan pemerintah pusat masih bersifat instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah (daerah yang tidak mampu melaksanakan otonomi daerah). Efektifitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin besar realisasi penerimaan PAD dibanding target penerimaan PAD, maka dapat dikatakan semakin efektif begitu pula sebaliknya.

Tabel 2. Tingkat Efektivitas PAD

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD	%	Keterangan
2004	2,256,000	2,450,000	92.08	Efektif
2005	4,322,510	6,754,700	63.99	Tidak Efektif
2006	9,752,335	10,765,000	90.59	Efektif
2007	4,949,800	4,950,000	100.00	Sangat Efektif
2008	12,327,518	24,816,034	49.68	Sangat Tidak Efektif
2009	6,686,231	30,718,578	21.77	Sangat Tidak Efektif
2010	11,501,060	11,319,524	101.60	Sangat Efektif
2011	14,713,439	11,165,281	131.78	Sangat Efektif
2012	22,710,060	26,577,538	85.45	Efektif
2013	20,759,161	24,395,648	85.09	Efektif

Sumber: Data diolah, 2014

Pendapatan Asli Daerah sebesar 82,20%. Namun perlu dicermati lebih lanjut melihat dari data realisasi dan target PAD diatas nampak bawa penetapan target cenderung mengikuti realisasi PAD tahun sebelumnya apabila tahun sebelumnya target PAD terpenuhi maka target tahun berikutnya PAD akan dinaikkan namun bila realisasi tahun sebelumnya tidak sesuai target maka tahun berikutnya target PAD akan diturunkan agar realisasi PAD dapat memenuhi target. Seperti nampak terlihat pada tahun 2008 dengan target sebesar Rp 24,816,034 milyar ternyata hanya terpenuhi 49,68%, dan di tahun 2009 kembali dinaikkan dengan asumsi peningkatan PAD karena efek ditemukannya tambang emas di Kabupaten Bombana pada tahun 2008 namun hal itu tetap tidak dapat diandalkan untuk memenuhi target realisasi PAD karena aturan dan undang-undang yang menetapkan bahwa sektor pertambangan dan bahan galian golongan C merupakan sumber penerimaan negara. Pola yang sama pun masih nampak di tahun 2010 sampai dengan 2013 dimana Pemerintah daerah Kabupaten Bombana cukup berhati-hati dalam menetapkan target PAD nya agar tidak terlalu jauh melenceng dari realisasi PAD.

Tabel 3. Tingkat Keserasian Belanja

Tahun	Belanja Modal	Belanja Barang dan Jasa	Total Belanja	%
2004	24,930,000	20,800,000	68,749,668	66.52
2005	73,000,000	29,455,890	212,668,000	48.18
2006	73,996,270	30,378,730	181,503,714	57.51
2007	94,893,877	38,956,119	232,762,956	57.50
2008	114,972,072	68,954,046	320,337,508	57.42
2009	71,916,205	90,986,149	317,773,639	51.26
2010	51,087,127	43,082,945	279,240,669	33.72
2011	84,128,846	70,892,768	374,191,656	41.43
2012	115,274,965	77,568,782	456,795,546	42.22
2013	167,823,915	96,162,027	524,698,462	50.31
Rata-rata	87.202.327,70	56.723.745,60	296.872.181,80	50,61

Sumber: Data diolah, 2014

Tingkat keserasian belanja Kabupaten Bombana sudah menunjukkan arah yg positif dengan melihat sisi pengeluaran yang menunjukkan bahwa belanja tidak langsung sebesar 45,64% dan belanja langsung sebesar 54,36% dari total pengeluaran pemerintah Kabupaten Bombana dari tahun 2004-2013. Dari perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa belanja modal ditambah belanja barang dan jasa setiap tahunnya mengalami peningkatan dengan rata-rata 50,61 % dari total belanjanya, hal ini mengindikasikan adanya trend yang positif dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana dalam mengalokasikan anggarannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum dilakukan analisis regresi linear berganda, maka dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas. Uji normalitas bertujuan

untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak (Ghazali, 2011). Pada penelitian ini uji normalitas yang digunakan adalah grafik normal P-Plot. Dari hasil uji normalitas diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal. Selain itu, data yang diolah juga memenuhi kriteria uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

Tabel 4. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Coefficients			Tolerance	VIF
	B	Std. Error	Beta				
(Constant)	1,374	,474		2,901	,034		
X1	,093	,029	,292	3,210	,024	,421	2,374
X2	,054	,009	,381	5,918	,002	,843	1,187
X3	,054	,009	,521	5,984	,002	,459	2,178
X4	,183	,026	,577	7,080	,001	,525	1,904

Sumber: Data diolah, 2014

Berdasarkan hasil analisis data regresi mengenai pengaruh kemandirian fiskal, efektifitas PAD, keserasian belanja dan pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia yang terlihat pada tabel 4, maka persamaan regresi dapat diuraikan sebagai berikut:

$$Y=1,174 + 0,093 X1 + 0,054X2 + 0,054X3 +0,183X4$$

Dari hasil persamaan regresi tersebut mempunyai arti sebagai berikut: Konstanta sebesar 1,374 yang diartikan bahwa kemandirian keuangan, efektifitas PAD, aktivitas belanja dan pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Bombana. Koefisien regresi untuk Kemandirian fiskal bernilai positif sebesar 0,093 hal ini berarti bahwa dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah maka akan berpengaruh terhadap IPM. Koefisien regresi untuk efektifitas PAD bernilai positif sebesar 0,054 hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan efektifitas PAD maka akan berpengaruh terhadap IPM. Koefisien regresi untuk keserasian belanja bernilai positif sebesar 0,054 hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan aktivitas maka akan berpengaruh terhadap IPM. Koefisien regresi untuk pertumbuhan ekonomi bernilai positif sebesar 0,183 hal ini menunjukkan bahwa dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi maka akan berpengaruh terhadap IPM.

Tabel 5. Nilai R-Square

R-Square	Adjusted R-Square
.983	.969

Sumber: Data diolah, 2014

Nilai R square (koefisien determinasi) sebesar 0,983 atau 98,3%. Hal ini menunjukkan bahwa presentase pengaruh variabel independen (kemandirian keuangan, efektifitas PAD, aktivitas dan pertumbuhan ekonomi) mampu menjelaskan sebesar 98,3% variasi variabel Indeks Pembangunan Manusia, sedangkan sisanya sebesar 1,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel kemandirian terhadap indeks pembangunan manusia berpengaruh secara signifikan dengan arah yang positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini berarti bahwa peningkatan kemandirian fiskal daerah akan mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini IPM. Hasil studi ini juga sesuai dengan hasil studi empiris yang dilakukan oleh (Swandewi, 2014), hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan dan kemandirian fiskal daerah pengaruh positif terhadap keserasian anggaran Kemandirian keuangan daerah, dana perimbangan, dan keserasian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemandirian fiskal yang berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat tersebut telah cukup menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal didaerah telah berjalan sebagaimana mestinya. Ditinjau dari sisi konsep

desentralisasi fiskal, kondisi yang terjadi di Kabupaten Bombana menunjukkan mulai adanya kesadaran pemerintah daerah dalam memaknai konsep desentralisasi fiskal, bahwa inti dari desentralisasi fiskal adalah kemandirian daerah.

Pengaruh Efektivitas PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel Efektivitas PAD berpengaruh secara signifikan dengan arah yang positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil analisis ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Qisthina dkk., 2020), yang menyatakan bahwa Kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak daerah, retribusi dan lain-lain melalui otonomi daerah dan pembangunan daerah bisa diwujudkan hanya apabila disertai kemandirian fiskal yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintahan daerah secara finansial harus bersifat independent terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak, retribusi dan sebagainya. Berdasarkan konsepnya, Efektivitas PAD atau pencapaian target PAD tahun lalu mencerminkan kinerja keuangan daerah dalam merealisasikan target PAD pada tahun lalu. Pencapaian PAD tahun lalu yang melampaui target menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan asli daerah. Oleh karena itu, jika pencapaian PAD tahun lalu melampaui target maka target untuk tahun berikutnya harus ditingkatkan minimal sebesar pencapaian tahun lalu.

Pengaruh Keserasian Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel keserasian belanja berpengaruh secara signifikan dengan arah yang positif terhadap indeks pembangunan manusia. Adanya pengaruh positif keserasian belanja terhadap kesejahteraan masyarakat sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh (Panglima, 2003) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (PDRB) melalui berbagai kebijakan yang tercermin dalam APBD. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh (Amalia & Purbadharmaja, 2014) menemukan bahwa secara parsial kemandirian fiskal daerah dan keserasian alokasi belanja berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM. Prioritas belanja dalam rangka peningkatan pembangunan manusia akan meningkatkan pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pembangunan manusia dapat dicermati dari besar kecilnya IPM. Apabila IPMnya mengalami peningkatan, maka dapat diduga bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan mengalami peningkatan

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara signifikan kearah yang positif terhadap indeks pembangunan manusia. Hasil analisis ini sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ranis, 2022), menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek penting terhadap indeks pembangunan manusia. Pembangunan manusia dapat dilihat sebagai suatu aspek yang mungkin dapat mempengaruhi maksimalisasi keuntungan. Dengan demikian, pembangunan manusia selalu berhubungan dengan modal manusia, sedangkan modal manusia dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, sehingga pembangunan manusia akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang tinggi akan meningkatkan pendapatan penduduk dan seterusnya taraf hidup; akhirnya menjamin keselamatan sosial masyarakat, meningkatkan tahap kesehatan, keharmonisan serta kesejahteraan yang berkelanjutan yang akan dapat melangsungkan pertumbuhan ekonomi (Abu Bakar, 2004).

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis data penelitian, dapat disimpulkan bahwa kemandirian fiskal berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang bermakna bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah maka akan turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Efektifitas PAD berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia yang bermakna bahwa semakin besar efektifitas atau pencapaian target PAD maka akan meningkatkan alokasi belanja modal sehingga turut mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Keserasian belanja berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia bermakna bahwa semakin besar anggaran belanja untuk masyarakat maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia bermakna bahwa semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka akan dapat meningkatkan indeks pembangunan manusia. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia. Penelitian dilakukan hanya menggunakan data

sekunder laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bombana tahun 2004 sampai dengan tahun 2013, tanpa dilakukan konfirmasi dalam bentuk wawancara atau kuesioner untuk mengetahui kendala-kendala dalam pencapaian kinerja keuangan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu bakar, A. S. & A. M. A. (2004). Modal, Kepentingan Sosial dalam Pertumbuhan Ekonomi. *IJMS 11 (SPECIAL ISSUE)*, 197–212.
- Agustiawan, Wilda Fatmala, Yunarsi, La Jejen, Indarta Priyana, Filasti Rahma, Dikdik Purwadisastra, Neri Payage, Luh Kartika Ningsih, Ni Luh Putu Eka Yudi Prastiwi, Mochamad Vrans Romi, Ayu Nike Retnowati, F. M. H. T. (2022). Sumber Daya Manusia dalam Perusahaan. In H. F. Ningrum (Ed.), *Media Sains Indonesia*.
- Amalia, F. R., & Purbadharmaja, I. B. P. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia | E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(6), 257–264.
- Badan Pusat Statistik Sulawesi Tenggara. (2013). *No Title*.
- Ghazali, I. (2011). *Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Rajawali Pers.
- Hidayat, M. F., & Maski, G. (2013). Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah terhadap Alokasi Belanja Modal (Studi pada Kabupaten dan Kota di Jawa Timur). *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya*, 1(2), 1–19.
- Hobrouw, Y. A., Suaryana, I. G. N. A., & Asri Dwija Putri, I. G. A. M. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Indeks Pembangunan Manusia. *E-Jurnal Akuntansi*, 31(2), 401. <https://doi.org/10.24843/eja.2021.v31.i02.p11>
- Made., W. (2006). *Metodologi Penelitian Sosial Ekonomi*. ANDI Publisher.
- Mayangsari. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening di Provinsi Jawa Tengah. In *Pascasarjana STIE YKPN*.
- Panglima., S. J. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Ghalia Indonesia.
- Qisthina, F. A., Wahyudi, S. T., & Khusaini, M. (2020). Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Di Kabupaten Dan Kota Swp Gerbangkertasusila Plus. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 10(2), 107–118. <https://doi.org/10.37932/j.e.v10i2.109>
- Ranis, G. (2022). Economic growth and human development. *Well-Being and Growth in Advanced Economies*, 28(2), 87–109. <https://doi.org/10.4324/9781003241676-6>
- Saputra. (2013). the Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth and Social Welfare. *Jurnal Borneo Administrator*, 9(1).
- Siburian, M. T., Abdullah, M. A., & Firmansyah, A. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dan Ukuran Pemerintah Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011—2018. *Tirtayasa Ekonomika*, 16(1), 1. <https://doi.org/10.35448/jte.v16i1.11149>
- Swandewi, A. A. I. A. (2014). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(7), 356–376.
- Teja, M. (2015). Development for Welfare Society in Coastal Area. *Jurnal Aspirasi*, 6(6), 63–76.
- Wahyuni, I. G. A. P., Sukarsa, M., & Yuliarmi, N. (2014). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kesenjangan Pendapatan Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*, 3(8), 458–477.